



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079176 Ext.1521, Fax. (021) 29079201

Nomor : 991 /DJU/HK.00.1/10/2020

Jakarta, 15 Oktober 2020

Lampiran : 15 (lima belas) halaman

Hal : Sosialisasi dan Bimtek SPPT-TI

Yth.

Ketua Pengadilan Tinggi (terlampir)

di

tempat

Menindaklanjuti surat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor Un.1640/HK.00.01/09/2020 perihal Sosialisasi dan Bimbingan Teknis SPPT-TI Tahun 2019-2020 yang akan diselenggarakan tanggal 20 Oktober 2020 (terlampir), dengan ini diminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk menunjuk Ketua Pengadilan Negeri, Hakim dan Panitera pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana terlampir untuk menghadiri kegiatan tersebut.

Demikian, terimakasih.



**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM**

PRIM HARYADI

Daftar Pengadilan Tinggi

No	Nama Pengadilan Tinggi
1	Pengadilan Tinggi Pekanbaru
2	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
3	Pengadilan Tinggi Padang
4	Pengadilan Tinggi Bengkulu
5	Pengadilan Tinggi Jambi
6	Pengadilan Tinggi Pontianak
7	Pengadilan Tinggi Samarinda
8	Pengadilan Tinggi Palangkaraya
9	Pengadilan Tinggi Manado
10	Pengadilan Tinggi Palu
11	Pengadilan Tinggi Kendari
12	Pengadilan Tinggi Gorontalo
13	Pengadilan Tinggi Kupang
14	Pengadilan Tinggi Ambon
15	Pengadilan Tinggi Maluku Utara
16	Pengadilan Tinggi Jayapura

Daftar Pengadilan Negeri

No	Nama Pengadilan Tinggi	Nama Pengadilan Negeri
1	Pengadilan Tinggi Pekanbaru	Pengadilan Negeri Batam
		Pengadilan Negeri Tanjung Pinang
		Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
2	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	Pengadilan Negeri Sungailiat
		Pengadilan Negeri Pangkal Pinang
		Pengadilan Negeri Mentok
3	Pengadilan Tinggi Padang	Pengadilan Negeri Pasaman Barat
		Pengadilan Negeri Pariaman
4	Pengadilan Tinggi Bengkulu	Pengadilan Negeri Bengkulu
		Pengadilan Negeri Arga Makmur
		Pengadilan Negeri Curup
5	Pengadilan Tinggi Jambi	Pengadilan Negeri Jambi
		Pengadilan Negeri Sengeti
		Pengadilan Negeri Muara Bungo
6	Pengadilan Tinggi Pontianak	Pengadilan Negeri Mempawah
		Pengadilan Negeri Ketapang
		Pengadilan Negeri Putusibau
		Pengadilan Negeri Sanggau
		Pengadilan Negeri Singkawang
		Pengadilan Negeri Sintang
7	Pengadilan Tinggi Samarinda	Pengadilan Negeri Tarakan
		Pengadilan Negeri Nunukan
		Pengadilan Negeri Samarinda
		Pengadilan Negeri Tenggarong
		Pengadilan Negeri Sangatta
		Pengadilan Negeri Tanah Grogot
8	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	Pengadilan Negeri Palangkaraya
		Pengadilan Negeri Sampit
		Pengadilan Negeri Kuala Kapuas
		Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

9	Pengadilan Tinggi Manado	Pengadilan Negeri Kotamobagu
		Pengadilan Negeri Airmadidi
		Pengadilan Negeri Amurang
		Pengadilan Negeri Bitung
		Pengadilan Negeri Tondano
10	Pengadilan Tinggi Palu	Pengadilan Negeri Palu
		Pengadilan Negeri Poso
		Pengadilan Negeri Luwuk
		Pengadilan Negeri Donggala
11	Pengadilan Tinggi Kendari	Pengadilan Negeri Kendari
		Pengadilan Negeri Raha
		Pengadilan Negeri Kolaka
		Pengadilan Negeri Unaaha
12	Pengadilan Tinggi Gorontalo	Pengadilan Negeri Limboto
13	Pengadilan Tinggi Kupang	Pengadilan Negeri Kupang
		Pengadilan Negeri Oelamasi
14	Pengadilan Tinggi Ambon	Pengadilan Negeri Ambon
15	Pengadilan Tinggi Maluku Utara	Pengadilan Negeri Ternate
16	Pengadilan Tinggi Jayapura	Pengadilan Negeri Jayapura
		Pengadilan Negeri Sorong



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (021) 34830612**

Nomor : Un. 1640 /HK.00.01/09/2020 Jakarta, 30 September 2020
Sifat : Biasa.
Lampiran : 1 Eks.
Hal : Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis SPPT-TI.

Yth. Daftar undangan terlampir

Dalam rangka menindaklanjuti Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan target perluasan wilayah implementasi Sistem *Database* Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) Tahun 2019-2020, Kedeputian Bidkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam akan melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis SPPT-TI terhadap wilayah perluasan (terlampir), pada :

Pada hari, tanggal : Selasa, 20 Oktober 2020

Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai

Tempat : *Webinar* melalui aplikasi *Zoom*

Pimpinan : Deputi Bidkooor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam

Sehubungan dengan hal tersebut mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi dapat menunjuk pihak-pihak berikut untuk hadir sebagai peserta pada acara dimaksud:

Unit Kerja	Pejabat Diundang	Jumlah
Pengadilan Tinggi	Panitera Pengadilan Tinggi	1
	Hakim	4
Pengadilan Negeri	Ketua Pengadilan Negeri	1
	Panitera Pengadilan Negeri	1
	Hakim	4

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Deputi Bidkroor Hukum dan HAM,

Dr. Sugeng Purnomo



Tembusan :

1. Menko Polhukam;
2. Dirjen Badilum Mahkamah Agung;
3. Kepala Biro dan Humas Mahkamah Agung;
4. Inspektur Kemenko Polhukam.

Catatan :

1. Pendaftaran pada tanggal 12 s.d. 16 Oktober 2020 melalui link :
bit.ly/347RK82
2. *Contact Person* :
 - Sdr. Kombes Pol. M. Syafrial, S.H., S.I.K. (HP. 081266065493)
 - Sdr. L. Ziad Rahman Ghozali, S.H. (HP. 081252868690)

Lampiran Surat Undangan I
Nomor : Un. 1640 /HK.00.01/09/2020
Tanggal : 30 September 2020

DAFTAR UNDANGAN

1. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Padang;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Manado;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Palu;
11. Ketua Pengadilan Tinggi Kendari;
12. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo;
13. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang;
14. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon;
15. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
16. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura.

Lampiran Surat Undangan II
 Nomor : Un. 1640 /HK.00.01/09/2020
 Tanggal : 30 September 2020

DAFTAR SATUAN KERJA TARGET WILAYAH IMPLEMENTASI

Provinsi	Kabupaten/Kota	
Sumatera Barat	1. Kab. Pasaman Barat	2. Kota Pariaman
Kep. Bangka Belitung	1. Kab. Bangka	3. Kota Pangkal Pinang
	2. Kab. Bangka Barat	
Kep. Riau	1. Kab. Karimun	3. Kota Tanjung Pinang
	2. Kota Batam	
Bengkulu	1. Kab. Rejang Lebong	3. Kota Bengkulu
	2. Kab. Bengkulu Utara	
Jambi	1. Kab. Muarojambi	3. Kota Jambi
	2. Kab. Bungo	
Kalimantan Barat	1. Kab. Sambas	5. Kab. Sintang
	2. Kab. Mempawah	6. Kab. Kapuas Hulu
	3. Kab. Sanggau	7. Kota Singkawang
	4. Kab. Ketapang	
Kalimantan Utara	1. Kab. Nunukan	2. Kota Tarakan
Kalimantan Tengah	1. Kab. Kotawaringin Barat	3. Kab. Kapuas
	2. Kab. Kotawaringin Timur	4. Kota Palangkaraya
Kalimantan Timur	1. Kab. Paser	4. Kab. Kutai Timur
	2. Kab. Kutai Kartanegara	5. Kota Samarinda
	3. Kab. Berau	
Sulawesi Utara	1. Kab. Minahasa	4. Kota Bitung
	2. Kab. Minahasa Selatan	5. Kota Kotamobagu
	3. Kab. Minahasa Utara	
Sulawesi Tengah	1. Kab. Banggai	3. Kab. Donggala
	2. Kab. Poso	4. Kota Palu
Sulawesi Tenggara	1. Kab. Kolaka	3. Kab. Muna
	2. Kab. Konawe	4. Kota Kendari
Gorontalo	1. Kab. Gorontalo	
Nusa Tenggara Timur	1. Kab. Kupang	2. Kota Kupang
Maluku	1. Kota Maluku	
Maluku Utara	1. Kota Ternate	
Papua	1. Kota Jayapura	2. Kota Sorong

**RUNDOWN SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS SPPT-TI
20 OKTOBER 2020
(MAHKAMAH AGUNG)**

NO.	AGENDA	SUBYEK	WAKTU	KET.
1.	Pembukaan : a. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya b. Doa	Pembawa Acara	10.00-10.10	
2.	Sambutan	Deputi Bidkooor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam	10.10-10.15	
3.	Sosialisasi : a. Pre Test b. Pemaparan Narasumber : 1) Kemenko Polhukam 2) Mahkamah Agung 3) Kemkominfo 4) BSSN 5) Stranas Pencegahan Korupsi c. Tanya-Jawab d. Post Test		10.15-11.30	
4.	Bimbingan Teknis : a. Pre Test b. Bimbingan Teknis (Ditjen Badilum/Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung) c. Post Test		11.30-13.00	
5.	Penutup	Pembawa Acara		

KERANGKA ACUAN (*TERM OF REFERENCE*)
PELAKSANAAN WEBINAR SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS
WILAYAH IMPLEMENTASI SISTEM *DATABASE* PENANGANAN PERKARA TINDAK
PIDANA SECARA TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
(SPTT-TI)

JAKARTA, SEPTEMBER 2020

KERANGKA ACUAN (*TERM OF REFERENCE*)
PELAKSANAAN SOSIALISASI WILAYAH IMPLEMENTASI SISTEM *DATABASE*
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA SECARA TERPADU BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI
(SPPT-TI)

1. Latar Belakang.

- a. Salah satu sasaran strategis pembangunan hukum dalam RPJMN 2015-2019 adalah penegakan hukum yang berkualitas, maka untuk mewujudkan sasaran tersebut, salah satu arah kebijakan yang ditempuh adalah keterpaduan sistem peradilan pidana yakni melalui pengembangan sistem database penanganan perkara secara terpadu berbasis teknologi informasi atau dikenal dengan istilah SPPT-TI.
- b. Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi melalui salah satu aksinya mengamanatkan Menko Polhukam sebagai koordinator pengembangan sistem penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi antar instansi penegak hukum yang saat ini dikenal dengan SPPT-TI.
- c. Bahwa keberhasilan pelaksanaan pertukaran data antar komponen sistem peradilan pidana yang diwadahi oleh SPPT-TI tidak hanya bergantung dari aplikasi yang digunakan atau infrastruktur maupun sumber daya manusia saja namun juga dukungan penuh dari pimpinan dan satuan kerja yang ada di kewilayahan sebagai wilayah yang dijadikan wilayah pengembangan implementasi target Stranas Pencegahan Korupsi tahun 2020.
- d. Bahwa kegiatan sosialisasi SPPT-TI kepada satuan kerja di wilayah merupakan suatu hal yang penting dalam memberikan pengertian dan pengetahuan tentang fungsi peran dan tujuan SPPT-TI serta memberikan pemahaman tentang pentingnya memasukan data/input data pada aplikasi masing-masing Kementerian dan Lembaga secara baik dan benar sehingga diperoleh data yang berkualitas.
- e. Program Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang menjadi salah satu Aksi Pencegahan Korupsi mendapatkan penambahan target Pengembangan wilayah implementasi pada tahun 2020 sebanyak 25 (dua puluh lima) Provinsi dan 109 (seratus sembilan) Kota/Kabupaten. Kesepakatan atas pengembangan tersebut akan menjadi penilaian dalam target stranas pencegahan korupsi tahun 2020.

- f. Untuk mencapai dari Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi maka perlu diadakan sebuah kegiatan sosialisasi bagi para aparat penegak hukum terutama di daerah yang bertujuan untuk memperdalam dan mempertajam kesepahaman serta membangun komitmen dalam tahapan proses Pengembangan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis teknologi informasi di wilayah-wilayah yang belum tersosialisasi.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Pelaksanaan Sosialisasi Pengembangan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi dimaksudkan untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada aparat penegak hukum di daerah terkait peran masing-masing APH dalam pertukaran data SPPT-TI

b. Tujuan

Tujuan dari Sosialisasi ini adalah

- 1) Meningkatkan pemahaman terhadap pentingnya SPPT TI dalam meningkatkan mutu administrasi penanganan perkara di masing-masing APH.
- 2) Meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan input dan mutu data pada masing-masing aplikasi administrasi penanganan perkara.
- 3) Meningkatkan kapabilitas dan kemampuan APH untuk melakukan input data yang bermutu pada masing-masing aplikasi administrasi penanganan perkara.
- 4) Meningkatkan pemahaman akan pentingnya peran satuan kerja di daerah dalam pelaksanaan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi baik dalam hal sarana prasarana maupun sumber daya manusia

3. Keluaran yang dihasilkan (Outcome)

Tercapainya satu kesepahaman secara nasional terkait SPPT-TI di aparat penegak hukum guna mendukung penegakan hukum yang memenuhi nilai-nilai transparansi proses hukum, keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

4. Tempat Kegiatan dan Waktu:

Kegiatan akan dilaksanakan melalui Webinar dengan platform Zoom Meeting pada :

a. Polri pada tanggal 6 Oktober 2020

- 1) Pendaftaran dilakukan antara tanggal 28 September s.d. 2 Oktober 2020
- 2) Link pendaftaran : *selanjutnya akan diinformasikan*

b. Kejaksaan pada tanggal 13 Oktober 2020 :

- 1) Pendaftaran dilakukan antara tanggal 5 s.d. 9 Oktober 2020
- 2) Link pendaftaran : *selanjutnya akan diinformasikan*

- c. Pengadilan Tanggal 20 Oktober 2020 :
 - 1) Pendaftaran dilakukan antara tanggal 12 s.d. 16 Oktober 2020
 - 2) Link pendaftaran: *selanjutnya akan diinformasikan*

- d. Ditjenpas Kemenkumham pada tanggal 27 Oktober 2020 : untuk Lapas/Rutan.
 - 1) Pendaftaran dilakukan antara tanggal 19 s.d. 23 Oktober 2020
 - 2) Link pendaftaran: *selanjutnya akan diinformasikan*

Registrasi

Setiap peserta melakukan registrasi atas namanya sendiri

5. Susunan Acara

- a. Pembukaan
 - 1) Menyanyikan lagu Indonesia Raya
 - 2) Sambutan Deputi Bidkooor Hukum dan HAM
 - 3) Doa
- b. Sosialisasi
 - 1) Pre Test Sosialisasi
 - 2) Paparan Para Narasumber
 - 3) Tanya jawab
 - 4) Post Test Sosialisasi
- c. Bimbingan Teknis
 - 1) Pre Test Bimtek
 - 2) Bimbingan teknis untuk para pelaksana input data administrasi penanganan perkara
 - 3) Post Test Bimtek
- d. Penutup

6. Peserta

Peserta sosialisasi dan bimbingan teknis adalah pejabat menengah (*middle officer*) yaitu Pejabat Ditreskrimum Polda, Aspidum dan Aspidsus Kejaksaan Tinggi, Panitera Pengadilan Tinggi dan Kadivpas Kanwil Kemenkumham dan para Kasat Reskrim Polres/Ta, Kasi Pidum dan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri, Panitera Pengadilan Negeri, Kepala Rutan/Lapas

a. Kepolisian :

Polda : Kapolda, Dirreskrimum, Dirreskrimsus, Dirnarkoba, KBO dari masing-masing direktorat di tingkat Polda, dan 5 orang perwakilan penyidik di setiap satker.

Polres : Kapolres, Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, KBO dari masing-masing satker, dan 5 orang perwakilan penyidik di setiap satker.

b. Kejaksaan

Kejati : Kajati, Aspidum, Aspidsus, dan 5 orang perwakilan jaksa di Kejati

Kejari : Kajari, Kasie Pidum, Kasie Pidsus, dan 5 orang perwakilan jaksa di Kejari

c. Pengadilan

PT : Ketua PT, Penitera PT dan 4 perwakilan Hakim pada PT;

PN : Ketua PN, Panitera PN dan 4 perwakilan Hakim pada PT.

d. Lapas/Rutan

Kanwil : Kakanwil dan Kadivpas;

Lapas/Rutan : Kalapas/Karutan, Kasi Pembinaan dan Kasi/Kasubsi Registrasi, serta
2 staf di masing-masing Seksi Pembinaan dan Seksi/Sub Seksi
Registrasi;

Bapas (Dalam rangka mengakomodir perkara TP Anak)

Wilayah :

a. Provinsi Kalimantan Barat

- 1) Kab. Sambas;
- 2) Kab. Mempawah;
- 3) Kab. Sanggau;
- 4) Kab. Ketapang;
- 5) Kab. Sintang;
- 6) Kab. Kapuas Hulu;
- 7) Kota Singkawang.

b. Provinsi Sulawesi Utara

- 1) Kab. Minahasa;
- 2) Kab. Minahasa Selatan;
- 3) Kab. Minahasa Utara;
- 4) Kota Bitung;
- 5) Kota Kotamobagu.

c. Provinsi Kalimantan Timur

- 1) Kab. Paser;
- 2) Kab. Kutai Kartanegara;
- 3) Kab. Berau;
- 4) Kab. Kutai Timur;
- 5) Kota Samarinda.

d. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- 1) Kab. Bangka;
- 2) Kab. Bangka Barat;
- 3) Kota Pangkal Pinang.

e. Provinsi Kepulauan Riau

- 1) Kab. Karimun;
- 2) Kota Batam;
- 3) Kota Tanjung Pinang.

- f. Provinsi Sumatera Barat
 - 1) Kab. Pasaman Barat;
 - 2) Kota Pariaman.
- g. Provinsi Jambi
 - 1) Kab. Muarojambi;
 - 2) Kab. Bungo;
 - 3) Kota Jambi.
- h. Provinsi Bengkulu
 - 1) Kab. Rejang Lebong;
 - 2) Kab. Bengkulu Utara;
 - 3) Kota Bengkulu.
- i. Provinsi Kalimantan Tengah
 - 1) Kab. Kotawaringin Barat;
 - 2) Kab. Kotawaringin Timur;
 - 3) Kab. Kapuas;
 - 4) Kota Palangkaraya.
- j. Provinsi Papua
 - 1) Kota Jayapura;
 - 2) Kota Sorong.
- k. Provinsi Nusa Tenggara Timur
 - 1) Kab. Kupang;
 - 2) Kota Kupang.
- l. Provinsi Sulawesi Tengah
 - 1) Kab. Banggai;
 - 2) Kab. Poso;
 - 3) Kab. Donggala;
 - 4) Kota Palu.
- m. Provinsi Sulawesi Tenggara
 - 1) Kab. Kolaka;
 - 2) Kab. Konawe;
 - 3) Kab. Muna;
 - 4) Kota Kendari.
- n. Provinsi Kalimantan Utara
 - 1) Kab. Nunukan;
 - 2) Kota Tarakan.
- o. Provinsi Gorontalo
 - 1) Kab. Gorontalo
- p. Provinsi Maluku
 - 1) Kota Maluku.
- q. Provinsi Maluku Utara
 - 1) Kota Ternate.

7. Narasumber

Pejabat Eselon II/III pada :

- a. Ditjen Badilum/Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung;
Memberikan materi mengenai Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang terhubung dengan SPPT-TI dan materi bimbingan teknis input data pada SIPP untuk mendukung SPPT TI.
- b. Pusiknas Bareskrim Polri/Robinops Bareskrim Polri;
Memberikan materi mengenai e-Manajemen Penyidikan (eMP) yang terhubung dengan SPPT-TI dan materi bimbingan teknis input data pada e-MP untuk mendukung SPPT TI.
- c. Puskasrimti Kejaksaan Agung;
Memberikan materi mengenai Case Management System (CMS) yang terhubung dengan SPPT-TI dan materi bimbingan teknis input data pada CMS untuk mendukung SPPT TI.
- d. Ditjenpas Kemenkumham
Memberikan materi mengenai Sistem Database Pemasayarakatan (SDP) yang terhubung dengan SPPT-TI dan materi bimbingan teknis input data pada SDP untuk mendukung SPPT TI.
- e. Kemenko Polhukam
Memberikan materi mengenai "Informasi Umum, Evaluasi Pertukaran Data, dan *Dashboard* SPPT-TI"
- f. Stranas Pencegahan Korupsi
Memberikan materi mengenai "SPPT TI sebagai aksi pencegahan korupsi dalam Stranas PK"
- g. Kemkominfo
Memberikan materi mengenai aspek teknologi, pengembangan Pusat Pertukaran Data (Puskarda) SPPT-TI, dan regulasi pemerintah terkait e-Government.
- h. BSSN
Memberikan materi mengenai keamanan sistem, kerahasiaan data, dan *digital signature* dalam SPPT-TI.

8. Penyelenggara

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jalan Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110 telp/fax (021) 3524225

- a. Kombes Pol M. Syafrial (0812660654903)
- b. Lalu Ziad (081252868690)
- c. Acep Suryadi (08176334135)

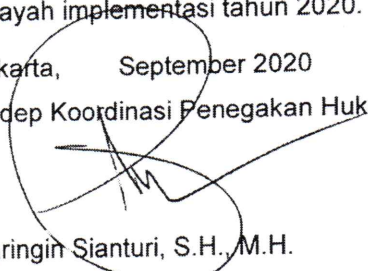
9. Dukungan Anggaran

Menggunakan anggaran sesuai DIPA Kemenko Polhukam TA. 2020

PENUTUP

Demikian rencana pelaksanaan Sosialisasi Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan sosialisasi SPPT - TI wilayah implementasi tahun 2020.

Jakarta, September 2020
Asdep Koordinasi Penegakan Hukum


Baringin Sianturi, S.H., M.H.

Tembusan:

PPK Kedepatian Bidkooor Hukum dan HAM